



Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Desa Penfui Timur Kabupaten Kupang

Deasi N. Paji¹, Masrida Sinaga², Galuh Wiedani K.D. Larasati^{3*}

¹⁻³ Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Corresponding Author: novipaji@email.com

Abstract. According to the anthropometric standards for evaluating children's nutritional status, stunting is a growth failure condition based on the weight-for-age (W/A) or height-for-age (H/A) index, where the measurement results fall within the threshold (Z-Score) of -2 SD to -3 SD (short/stunted) and -3 SD (very short/severely stunted). In 2023, 27.3% of the toddlers in Penfui Timur Village were still stunted. The purpose of this study is to ascertain how stunting reduction policies are being implemented in Penfui Timur Village, Kupang Regency. This research used a qualitative descriptive method with data collection techniques of in-depth interviews, observation and documentation. The informants in this study is 8 informants, consisting of 2 main informants and 6 supporting informants. The main informants are the head of the Penfui Timur village and the nutrition staff of the Tarus Health Center. The supporting informants are 2 posyandu cadres, mothers of stunted toddlers, pregnant women, village residents, and teenage girls. The data analysis process in this research begins by collecting data from interviews and then reducing the resulting data. After that, the data is presented and concluded. The study's result showed that although the policy has been applied effectively, it still falls short of the implementation theory's requirements. The implementers' low educational and human resource levels, the ignorance of expectant mothers and parents of children with stunted growth, and the lack of facilities and infrastructure are the contributing reasons. Although the village government's communication component with other implementing parties has been functioning smoothly, communication with the leaders of the target community has not been at its best. The policy implementers are already familiar with the methods and duties associated with their respective areas of responsibility. The bureaucratic structure's policy implementers are already familiar with the technical facets of reducing stunting. Based on the results of the study, it is recommended to increasing the knowledge involved in implementation policy for stunting reduction

Keywords: Implementation, policy, stunting.

Abstrak. Stunting menurut standar antropometri untuk menilai status gizi anak merupakan kondisi gagal tumbuh berdasarkan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang hasil pengukurannya berada dalam batas ambang (Z-Score) -2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/stunting) dan -3 SD (sangat pendek/stunting berat). Pada tahun 2023, sebanyak 27,3% balita di Desa Penfui Timur masih mengalami stunting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan penanggulangan stunting yang dilaksanakan di Desa Penfui Timur Kabupaten Kupang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang informan yang terdiri dari 2 orang informan utama dan 6 orang informan pendukung. Informan utama adalah Kepala Desa Penfui Timur dan petugas gizi Puskesmas Tarus. Informan pendukung adalah 2 orang kader posyandu, ibu balita stunting, ibu hamil, warga desa, dan remaja putri. Proses analisis data dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data dari hasil wawancara kemudian direduksi menjadi data yang dihasilkan. Setelah itu data dipaparkan dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah diterapkan secara efektif, namun masih belum memenuhi syarat teori implementasi. Rendahnya tingkat pendidikan dan sumber daya manusia pelaksana, ketidaktahuan calon ibu dan orang tua balita stunting, serta minimnya sarana dan prasarana menjadi faktor penyebabnya. Meskipun komponen komunikasi pemerintah desa dengan pihak pelaksana lainnya telah berjalan dengan baik, namun komunikasi dengan tokoh masyarakat sasaran belum berjalan dengan baik. Para pelaksana kebijakan sudah mengetahui metode dan tugas yang terkait dengan bidang tanggung jawabnya masing-masing. Para pelaksana kebijakan dalam struktur birokrasi sudah mengetahui aspek teknis penanggulangan stunting. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk meningkatkan pengetahuan yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanggulangan stunting.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, stunting.

1. LATAR BELAKANG

Menurut pedoman pertumbuhan anak WHO, z-score tinggi badan terhadap usia ≤ -2 standar deviasi mengindikasikan terjadinya stunting, yaitu masalah tumbuh kembang pada balita yang mengalami kekurangan gizi, sering sakit, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai (WHO, 2014). Penyebab utama terjadinya stunting adalah gizi yang tidak memadai (malnutrisi) dan infeksi berulang selama 1000 hari pertama pertumbuhan anak (Pratiwi, 2023). Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018, sekitar 30,8% atau 6,6 juta balita Indonesia mengalami stunting. Angka tersebut disusul oleh hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) yang menunjukkan prevalensi stunting sebesar 27,67% pada tahun 2019, dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang melaporkan prevalensi stunting sebesar 24,4% pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 21,6% (Risekdas, 2018). Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi balita stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT) menduduki peringkat teratas, yakni sebesar 42,6 persen, tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Tingginya prevalensi balita stunting didukung oleh proporsi balita yang mengalami gizi buruk yang cukup tinggi, yakni sebesar 29,5 persen (Risekdas, 2018). Artinya, tiga dari sepuluh balita di NTT mengalami gizi buruk (ntt.bps.go.id, 2019). Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting di NTT sebesar 37,3%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 35,3%. Angka tersebut tetap menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia (Kemenkes, 2022). Berdasarkan data profil kesehatan Provinsi NTT tahun 2018, prevalensi stunting di Kabupaten Kupang sebesar 42,9%. Pada tahun 2019 angka tersebut menurun menjadi 35,0% dan pada tahun 2020 berada pada angka 25,8% (Dinkes Kab. Kupang, 2020). Meskipun jumlah kasusnya cenderung menurun, namun prevalensi stunting di Kabupaten Kupang belum mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 9,3% pada tahun 2024. Desa Penfui Timur merupakan salah satu desa di Kabupaten Kupang yang persentase stuntingnya menurun namun masih di bawah target nasional. Angka prevalensi stunting di Desa Penfui Timur mengalami sedikit penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022, dengan angka stunting turun dari 19,0% menjadi 18,8%. Memasuki tahun 2023 keadaan berubah drastis, dengan angka stunting meroket hingga mencapai 27,3% (Dinkes Kab. Kupang, 2024).

Tingginya prevalensi stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor lingkungan fisik, faktor lingkungan sosial ekonomi, dan faktor budaya. Berbagai kendala dalam proses implementasi kebijakan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memang merupakan suatu proses yang kompleks (Hudson et al., 2019). Kebijakan merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan dan cara untuk mencapainya (Howlett & Cashore, 2014).

Upaya penurunan prevalensi stunting telah dilakukan melalui penetapan Peraturan Bupati Kupang Nomor 49 Tahun 2019 tentang percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting. Secara global, kebijakan untuk mengatasi masalah penurunan kejadian stunting harus difokuskan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau yang disebut Scaling Up Nutrition (SUN) sampai dengan usia 24 bulan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan penurunan angka stunting sebesar 3,9% per tahun untuk memenuhi target penurunan angka stunting sebesar 40% pada tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting, pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan target penurunan yang signifikan dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 14% pada tahun 2024.

Puskesmas Tarus merupakan salah satu puskesmas di Kabupaten Kupang yang terus melaksanakan berbagai program di masyarakat untuk menanggulangi masalah stunting. Program yang dilaksanakan antara lain kegiatan penyuluhan terkait stunting, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang menderita Kekurangan Energi Kronis (KEK), dan pemberian makanan tambahan bagi bayi/balita yang mengalami gizi buruk. Meskipun telah banyak program dan kebijakan yang dilaksanakan terkait dengan penanganan stunting, namun capaiannya masih di bawah target nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat berdasarkan teori kebijakan Edward III. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui Bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Desa Penfui Timur Kabupaten Kupang.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk mengkaji permasalahan yang memerlukan kajian mendalam dan bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Desa Penfui Timur, dengan cara menyikapi suatu situasi secara objektif untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Teknik penentuan informan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu informan yang dipilih memiliki pertimbangan tertentu dan tujuan peneliti. Informan penelitian berjumlah 8 orang, meliputi 2 orang informan utama dan 6 orang informan pendukung. Informan utama adalah Kepala Desa Penfui Timur dan petugas gizi Puskesmas Tarus. Informan pendukung meliputi 2 orang kader posyandu, ibu balita stunting, ibu hamil, warga desa, dan remaja putri. Yang menjadi perhatian peneliti kualitatif adalah “penyempurnaan” perolehan informasi, bukan banyaknya sampel sumber data (Sugiyono, 2013). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi transkrip wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data, dan triangulasi. Dari hasil analisis data kemudian dapat ditarik kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Distribusi Informan

NO	Inisial	Jenis kelamin	Umur	Jabatan	Keterangan
1	ZT	Laki-laki	64 tahun	Kepala Desa Penfui Timur	Informan Utama
2	MI	perempuan	54 tahun	Staf Gizi Puskesmas Tarus	Informan Utama
3	WL	perempuan	54 tahun	Kader Posyandu	Informan Tambahan
4	VG	perempuan	48 tahun	Kader Posyandu	Informan Tambahan
5	ML	perempuan	44 tahun	Ibu dari anak penderita <i>Stunting</i>	Informan Tambahan
6	DS	perempuan	28 tahun	Ibu hamil	Informan Tambahan
7	IN	perempuan	30 tahun	Masyarakat Desa	Informan Tambahan
8	ET	perempuan	14 tahun	Remaja Putri	Informan Tambahan

1. Upaya yang dilakukan dalam Intervensi Stunting di Desa Penfui Timur Kabupaten Kupang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan upaya intervensi sesuai dengan kerangka kebijakan khusus penanggulangan Stunting yang diimplementasikan melalui Peraturan Bupati Kupang Nomor 49 Tahun 2019. Berikut hasil wawancara dengan narasumber utama terkait upaya intervensi Stunting:

"Bagi desa, upaya penurunan Stunting selama ini sudah dilakukan." Dimulai dengan pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak yang mengalami Stunting, pemantauan satu bulan sekali saat Posyandu dan Posyandu remaja. Lokasi pelayanan posyandu terdiri dari 8 titik, dan kami dari desa bekerja sama dengan puskesmas dan kader posyandu, artinya kami selalu berkomunikasi secara tatap muka. (ZT)

2. Faktor Sumber Daya Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Desa Penfui Timur Kabupaten Kupang.

Sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi karena tanpa sumber daya manusia yang handal, implementasi akan berjalan lambat. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan terkait minimnya pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan penanggulangan stunting.

"Maaf, saya kurang begitu tahu tentang mekanisme pelaksanaan Stunting, tetapi saya tahu apa itu Stunting. Saya tahu tugas kami sebagai kader posyandu, seperti memberikan makanan tambahan untuk anak Stunting dan ibu hamil yang kurang gizi saat PMT. Kami juga diminta untuk memasak makanan yang akan dibagikan kepada anak Stunting dan ibu hamil kurang gizi, serta melaporkan TB/BB setelah ditimbang." (WL)

Sedangkan untuk informan yang menyampaikan kendala dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting, informan tersebut mengungkapkan minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang stunting. Berikut kutipan wawancaranya:

"Saya pernah dengar tentang stunting tetapi sudah lupa apa maksudnya. Itu baru waktu di posyandu, dan sekarang anak saya sudah SD, jadi sudah lupa. Selama ini belum ada sosialisasi tentang stunting di desa maupun di tempat lain." (IN)

Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung implementasi kebijakan dapat menjamin kebijakan berjalan sesuai rencana. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan informan terkait faktor pendukung dan penghambat terkait sarana:

"Untuk sarana dan prasarana masih kurang seperti timbangan. Setiap kali menyelenggarakan posyandu, timbangan harus dipinjam setelah posyandu lain selesai menggunakannya." (WL)

3. Faktor Pendukung dan Penghambat (Komunikasi) dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Desa Penfui Timur Kabupaten Kupang.

1. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi yang dimaksud dalam implementasi penanggulangan stunting di Desa Penfui Timur adalah sejauh mana tindak lanjut setelah dilakukan transformasi informasi

mengenai penanggulangan stunting diketahui oleh pelaksana dan pengambil keputusan. Berikut hasil wawancara dengan informan mengenai faktor pendukung dan penghambat komunikasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan stunting, berikut petikan wawancaranya:

“Dalam hal komunikasi, kami selalu melakukan koordinasi dan kolaborasi dari desa ke Pustu, dari Posyandu ke Pustu, kemudian ke Puskesmas, dan pihak yang selalu terlibat tentu dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, dan Pustu. Dari segi komunikasi, saya rasa tidak ada kendala karena setiap kali ada rapat, kami selalu bertemu langsung dengan para pelaksana di ruang rapat, jadi semuanya berjalan lancar.” (ZT)

2. Konsistensi Informasi

Konsistensi dalam menyampaikan informasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan sangat diperlukan, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan informan mengenai konsistensi informasi:

“Setiap posyandu, petugas kesehatan selalu memberikan edukasi tentang stunting, penyebabnya, dan pencegahannya. Petugas kesehatan juga selalu mengingatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah, termasuk memperhatikan pola makan dan air bersih yang kita konsumsi.” (DS)

4. Faktor Pendukung dan Penghambat (Disposition) dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Desa Penfui Timur Kabupaten Kupang.

1. SOP (Standard Operating Procedure)

Pelaksanaan pencegahan stunting di Desa Penfui Timur melibatkan petugas pelaksana seperti petugas Puskesmas dan kader Posyandu dalam proses pelaksanaan pencegahan stunting. Berikut hasil wawancara dengan narasumber tentang SOP:

"Tingkat pemahaman tenaga kesehatan tentang Stunting tentu sangat penting karena sebagai petugas pelaksana harus benar-benar memahami apa itu Stunting beserta dampaknya dan cara pencegahan serta penanggulangannya." Saya sebagai tenaga ahli gizi sudah memahami peran saya dalam pencegahan dan penanggulangan stunting, dan tenaga lainnya juga sudah memahami posisi masing-masing terkait tugas dan perannya. Misalnya bidan yang menangani ibu hamil biasanya mengukur berat badan, lingkar lengan atas, tinggi badan, tinggi fundus uteri, dan usia kehamilan ibu hamil untuk mengetahui apakah ibu hamil tersebut mengalami Kekurangan Energi Kronis, dan saya sebagai tenaga ahli gizi juga melakukan tugas dan peran saya. Karena koordinasi lintas program selalu berjalan, mulai dari penanganan remaja dengan

pemberian tablet zat besi, ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) diberikan makanan tambahan dan biskuit, serta balita diberikan makanan tambahan. (IM).

Pembahasan

- **Upaya yang dilakukan dalam intervensi Stunting di Desa Penfui Timur Kabupaten Kupang**

Berdasarkan Landasan Kebijakan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Kupang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Penfui Timur menunjukkan bahwa pemerintah Desa Penfui Timur telah melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting sesuai dengan anjuran dan pedoman. Aspek-aspek seperti upaya peningkatan kesehatan, penyuluhan, serta monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting di Desa Penfui Timur dilaksanakan melalui strategi intervensi terpadu yang melibatkan gizi spesifik dan sensitif.

Kegiatan yang dilakukan meliputi: 1. Edukasi dan sosialisasi, materi gizi, dan pencegahan stunting 2. Pengendalian infeksi dan deteksi dini penyakit, serta vaksinasi melalui posyandu dan polindes 3. Monitoring dan evaluasi kegiatan. Kegiatan intervensi gizi sensitif dan spesifik ini meliputi berbagai kegiatan yang diarahkan. Monitoring juga dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan pelaksanaan penanggulangan stunting berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Monitoring ini meliputi berbagai aspek seperti monitoring pelaksanaan kegiatan intervensi gizi, monitoring kesehatan anak baik yang mengalami stunting maupun gizi buruk, serta monitoring ibu hamil yang mengalami gizi buruk. Hal-hal seperti ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

- **Faktor Pendukung dan Penghambat Sumber Daya Manusia**

Dari sisi kualitas, sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan yang kompeten di bidangnya akan menjadi pendorong keberhasilan program (Pratiwi, 2023). Hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu satu anak terindikasi balita stunting terkait kendala dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting. Informan mengungkapkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang stunting, begitu pula tanggapan senada dari sebagian kader Posyandu yang kurang memiliki pengetahuan tentang stunting terkait dengan penyusunan menu gizi seimbang dan menu makanan yang dapat meningkatkan status gizi anak,

serta kurangnya pemahaman terkait mekanisme dalam pelaksanaan penanggulangan stunting. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan kader posyandu, serta kurangnya dukungan proaktif dari kader untuk membantu pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting di masyarakat desa. Beberapa faktor tersebut menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting. Namun dari segi kualitas, SDM tenaga kesehatan sudah melaksanakan sesuai standar kompetensi pelayanan yang dibutuhkan dalam penanganan Stunting. Namun bagi kader posyandu sebaiknya diberikan pelatihan dan pembinaan secara berkala terutama mengenai anak berisiko stunting dan penanganannya. Sarana merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Pelaksana dan petugas mempunyai kewenangan dalam melaksanakan tugasnya, namun tanpa adanya sarana pendukung (prasarana dan peralatan) maka pelaksanaan penanggulangan stunting akan terhambat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama yaitu Kepala Desa Penfui Timur menyatakan bahwa sarana dan prasarana penanganan Stunting di Desa Penfui Timur sudah memadai, namun sering terjadi kerusakan pada timbangan. Berdasarkan hasil observasi, peneliti mencatat bahwa terdapat sarana dan prasarana berupa baliho yang seharusnya dipasang di tengah-tengah desa atau di posyandu untuk meningkatkan kesadaran warga tentang dampak dan pencegahan stunting, belum tersedia, dan belum adanya gedung bidan desa untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa. Secara umum posyandu telah memiliki timbangan dan alat ukur tinggi badan. Namun beberapa posyandu di Desa Penfui Timur belum memiliki tempat yang permanen atau khusus untuk alat penimbangan, dimana sarana tersebut berfungsi sebagai penunjang kegiatan posyandu. Hal ini dapat menghambat terlaksananya kebijakan penanggulangan stunting.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, **tanpa** mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

Faktor Pendukung dan Penghambat (Komunikasi)

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Kegiatan komunikasi untuk memastikan apakah implementasi sesuai dengan isi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama Bapak Kepala Desa Penfui Timur mengenai kejelasan informasi yang disampaikan yang dapat mendukung kebijakan yang diimplementasikan, beliau menyatakan bahwa selalu ada komunikasi dan koordinasi dari pemerintah desa terhadap kader, pustu, dan petugas puskesmas. Dalam hal ini dapat mendukung implementasi kebijakan penanggulangan stunting. Hal yang sama juga disampaikan oleh Tenaga Gizi Puskesmas Tarus selaku pelaksana kepada kelompok sasaran di Desa Penfui Timur yaitu kejelasan informasi.

Penyampaian informasi tersebut mudah diterima dan dipahami oleh kelompok sasaran. Apabila penyampaian informasi yang jelas kepada kelompok sasaran menggunakan bahasa yang mudah dipahami akan membuat informasi mudah diterima oleh kelompok sasaran. Konsistensi yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan terhadap kelompok sasaran di Desa Penfui Timur meliputi faktor pendukung terkait konsistensi informasi di lapangan, dan melalui komunikasi yang baik dapat memperkuat proses penanggulangan stunting. Dan komunikasi yang baik akan sangat membantu para pihak untuk saling memahami, menghindari kesalahpahaman, serta memberikan rasa nyaman dan aman dalam melaksanakan kegiatan (Madani, 2023). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu ibu hamil disampaikan bahwa pada setiap posyandu, petugas kesehatan selalu memberikan informasi terkait stunting, penyebabnya, dan pencegahannya. Petugas kesehatan juga selalu mengingatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah, termasuk memperhatikan pola makan dan air bersih yang dikonsumsi. Peneliti dapat menganalisis bahwa konsistensi pelaksana kebijakan dalam menyampaikan informasi sudah maksimal. Petugas kesehatan dari Puskesmas Tarus telah berupaya dalam menyampaikan informasi setiap kali dilaksanakan kegiatan Posyandu agar kelompok sasaran mengerti dan memahami tentang bahaya dan pencegahan stunting. Adanya komunikasi untuk mendorong kebijakan yang baik dan jelas terkait isu yang berkembang di lapangan, dan melalui komunikasi yang baik dapat memperkuat proses penanganan stunting. Selain itu, komunikasi yang baik akan sangat membantu para pihak untuk saling memahami, menghindari kesalahpahaman, serta memberikan rasa nyaman dan aman dalam melaksanakan kegiatan (Madani, 2023).

Faktor Pendukung dan Penghambat (Disposisi)

Desa Penfui Timur sebagai desa pelaksana penanggulangan stunting juga memiliki insentif yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan penanggulangan stunting. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Penfui Timur, beliau menyatakan bahwa terdapat insentif dari dana desa bagi para pelaksana kebijakan penanggulangan stunting yaitu Kader Posyandu. Insentif yang diterima Kader Posyandu sebesar Rp.200.000,- per bulan dan insentif tersebut selalu diterima setiap enam bulan sekali. Dalam hal ini selama pelaksanaan penanggulangan stunting, para kader Posyandu sebagai agen pelaksana mendapatkan insentif. Namun menurut asumsi penulis sangat sedikit dan tidak sepadan dengan kerja keras para implementor. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab belum optimalnya implementasi penanggulangan stunting dikarenakan anggaran insentif untuk kader posyandu masih sedikit sehingga mengakibatkan petugas juga kurang optimal dalam memberikan pelayanan. Sikap para implementor dalam implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Desa Penfui Timur merespon dengan baik dan mendukung penuh adanya kebijakan tersebut. Pemerintah Desa Penfui Timur juga bersikap terbuka terhadap pihak eksternal dan berperan aktif dalam implementasi kebijakan penanggulangan stunting. Bersikap terbuka terhadap pihak eksternal dan aktif artinya Pemerintah Desa Penfui Timur merespon pihak eksternal seperti petugas Puskesmas Tarus, kader posyandu, dan pustu yang akan melaksanakan kebijakan penanggulangan stunting dengan dukungan yang baik. Komitmen para implementor kebijakan terhadap kelompok sasaran dapat dilihat melalui monitoring, evaluasi, dan pengawasan implementasi kebijakan.

Dalam pelaksanaannya di Desa Penfui Timur, beberapa keputusan yaitu sebagai alternatif kebijakan sangat dibutuhkan. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa Penfui Timur, menu makanan pada kegiatan PMT harus memenuhi standar gizi untuk diberikan kepada balita dan ibu hamil, namun makanan yang dibagikan kepada ibu hamil dan balita masih jauh dari memenuhi standar gizi tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dalam pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Situasi dan kondisi yang dimaksud adalah ketika pelaksanaan kegiatan tidak lagi sesuai dengan rencana awal, maka karena adanya kondisi tertentu, maka pelaksana dapat mengambil keputusan sebagai alternatif kebijakan untuk memastikan kegiatan tetap terlaksana berdasarkan rencana program. Koordinasi dan akuntabilitas pihak pelaksana kepada kader posyandu menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting di Desa Penfui Timur.

Faktor Pendukung dan Penghambat (Struktur Birokrasi).

Terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting di Desa Penfui Timur yang melibatkan pihak pelaksana seperti petugas puskesmas dan kader posyandu. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, Kepala Desa Penfui Timur menyatakan bahwa pelaksanaan penanggulangan stunting dilaksanakan sesuai standar SOP untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting. Dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang percepatan dan penanggulangan stunting dijelaskan bahwa pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan penanggulangan stunting. Diketahui bahwa ada juga pelaksana lain yang terlibat dalam kegiatan seperti Desa Penfui Timur yang selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kader Puskesmas dan Posyandu. Selain itu, informasi yang disampaikan oleh tenaga gizi Puskesmas Tarus menunjukkan bahwa tenaga kesehatan memahami perannya dalam pencegahan dan penanggulangan stunting, dan tenaga lainnya juga memahami kedudukannya terkait dengan tugas dan perannya masing-masing.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Desa Penfui Timur Kabupaten Kupang berdasarkan teori George Edward III telah terlaksana dengan baik, namun belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam teori implementasi. Faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan sumber daya manusia pelaksana, minimnya pengetahuan ibu hamil dan orang tua balita stunting, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Faktor komunikasi yang dibangun pemerintah desa dengan pelaksana lainnya sudah baik, namun komunikasi dengan tokoh masyarakat belum optimal. Disposisi atau pemahaman pelaksana terhadap teknis dan tanggung jawab pada divisi kerja masing-masing sudah memadai. Struktur birokrasi dalam implementasi penanggulangan stunting sudah dipahami oleh aparat pelaksana terkait aspek teknis implementasi penanggulangan stunting.

7. DAFTAR REFERENSI

- Dinkes Kab. Kupang. (2020). *Data Prevalensi Stunting di Kabupaten Kupang*.
Dinkes Kab. Kupang. (2024). *Data Prevalensi Stunting di Kabupaten Kupang*.

- Howlett, M., & Cashore, B. (2014). Conceptualizing public policy. In *Comparative policy studies: Conceptual and methodological challenges* (pp. 17–33). Springer.
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practice*, 2(1), 1–14.
- Hoddinott, J., Alderman, H., Behrman, J. R., Haddad, L., & Horton, S. (2013). The economic rationale for investing in stunting reduction. *Maternal and Child Nutrition*, 9(S2), 69–82. <https://doi.org/10.1111/mcn.12080>
- <https://ntt.bps.go.id/publication/2019/08/16/da2737bf17e4d09b5c5022bc/provinsi-nusatenggara-timur-dalam-angka-2019.html> diakses pada 6 Desember 2024
- Madan, E. M., Haas, J. D., Menon, P., & Gillespie, S. (2018). Seasonal variation in the proximal determinants of undernutrition during the first 1000 days of life in rural South Asia: A comprehensive review. *Global Food Security*, 19(August), 11–23. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2018.08.008>
- Madani, S. (2023). *Penanganan Stunting Balita Di Kabupaten Aceh Tengah*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Peraturan Bupati Kupang Nomor 19 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan Dan Penurunan Stunting.
- Pratiwi, D. A. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KOTA BATAM. *Jurnal EL-RIYASAH*, 14(1), 15–29.
- Risekdas. (2018). *Data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018*.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif,. *Kualitatif Dan R&D*.
- WHO. (2014a). *Global Nutrition Targets 2025: Stunting Policy Brief*. World Health Organization. Geneva.